

**PERJUANGAN POLITIK PEREMPUAN MERAIH KURSI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PADA PERIODE 2014-2019”**

By: Fahri

Fahri.baharuddin@gmail.com

Supervisor: Adlin S.Sos, M.Si

Library of Riau University

Department of Governmen
Faculty Of Social Science And Political Science
University of Riau

Campus bina widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Sipm. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

ABSTRAK

The public concern in political issues recently rises up. They concern to the embodiment of woman representation in Indonesian election. Hence, the power of woman attraction indeed takes another enthusiastic in some political issues. R.A Kartini ,Former political woman, drags the spirit in early her movement. The spirit of Kartini brings another chance for women empowered to be involved in political part. 30% of women quota proves their dedication for Kartini’s spirit. With constitution agreement, the public incredulity and hesitance still continue. The public assumption of women nature in line with their inabilities in politics is implicit. Moreover, women do not have a principal standing in political parties and appropriate rank in election process actually. Though, cultures, families, elites do not prevent their political willing for women interest needs. They build their own power through women organizations, background and hierarchy to compete in election process. The coherence both politic and women unified. Thus, because women consciousness of political rights. Affirmative action pushes women representation as constitution shows No. 8 2012 General Election of DPR, DPD dan DPD Chapter 56 Ayat (2), Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.

Keyword : Woman and Politic, Affirmative Action, Election

PENDAHULUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perjuangan politik perempuan meraih kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir pada periode 2014-2019 serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Fokus penelitian yaitu strategi caleg perempuan, modal-modal caleg perempuan, dan motivasi-motivasi caleg perempuan

Hasil penelitian yaitu

1. strategi caleg adalah sebuah taktik jitu yang dikemas sedemikian rupa sehingga menarik simpati dan memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu baik dari media cetak ataupun melalui media elektronik pada masa kampanye.
2. Modal-modal caleg adalah kualitas individu yang dimiliki, wawasan yang luas, serta penguasaan tentang ilmu politik dan Dukungan latarbelakang keluarga yang telah berkecimpung dan dikenal dalam dunia politik.
3. Motivasi-motivasi caleg adalah seputaran tujuan dan dorongan diri caleg dalam pemilu yang mewakili kepentingan daerah, melanjutkan pembangunan yang tertunda, menginspirasi kaum perempuan lainnya, dan mewakili kepentingan kaum perempuan.

Kesimpulan adalah caleg perempuan harus memiliki strategi jitu dalam pemilu merupakan suatu keharusan, berani tampil beda dan lebih kreatif hendaknya dirancang jauh hari sebelum masa pemilihan, dengan bermodalkan wawasan dan pengetahuan ilmu politik yang mumpuni sehingga pada nantinya terpilih sebagai anggota legislatif daerah dapat mewakili kepentingan-kepentingan kelompok juga mewujudkan tujuan dan motivasi dari caleg perempuan itu sendiri.

Kata kunci :perjuangan politik, caleg perempuan, pemilu.

Latar Belakang Masalah

Pergerakan dan perjuangan perempuan Indonesia secara nyata lahir bersama-sama dengan dikobarkannya semangat nasional oleh pemimpin-pemimpin nasional pada saat dikumandangkan “Sumpah Pemuda” di seluruh tanah air pada tahun 1928. Semenjak saat itulah berbagai perkumpulan dan organisasi berdiri yang dilandasi oleh kesadaran bahwa kaum perempuan sanggup dan mampu ikut mengatur masyarakat. Adapun kesadaran perempuan tersebut akan memberikan dampak besar dalam mendorong kepada keadilan dan keharmonisan hidup bersama dengan laki-laki.

Dominasi kaum lelaki di ranah politik, boleh dibilang tidak berimbang. Apalagi dalam konteks dunia politik Indonesia. Peran perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki, persentasenya sangat memprihatinkan. Ibarat permainan sepakbola, laki-laki identik dengan pemain sepakbola, walaupun sepakbola wanita sudah ada, namun gemanya masih kurang. Begitu juga dengan kaum perempuan, politik ibarat hanya permainan seni kaum lelaki.

Melihat fakta-fakta yang muncul tersebut maka isu kuota untuk perempuan dapat diwujudkan. Dengan demikian pada tahun 2003, Undang-undang No.12 pasal 65 ayat (1) tentang pemilu mengenai kuota perempuan disahkan, yang menyatakan bahwa

“Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”.

Ini merupakan langkah awal perjuangan politik perempuan yang mendapat dukungan formal untuk berkiprah di bidang politik. Adapun kuota perempuan

diterapkan dengan alasan yaitu kuota perempuan bukan diskriminasi tetapi memberikan kompensasi atas hambatan-hambatan aktual yang mencegah perempuan dan keterlibatannya secara adil dalam posisi politik, selain itu perempuan mempunyai hak representasi yang setara, dan juga pengalaman perempuan diperlukan dalam kehidupan politik.

Dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.22 & 24/PUU-VI/2008 yang isinya yaitu memutuskan bahwa memberlakukan atau mengesahkan sistem pemilihan suara terbanyak dalam pemilihan umum calon legislatif tahun 2009. Keputusan itu kemudian memicu banyak pendapat pro dan kontra dari berbagai pihak.

Bagi yang pro, keputusan berdasarkan suara terbanyak dianggap sebagai jalan keluar yang paling konstitusional dan harapannya adalah terpilihnya anggota-anggota legislatif yang memiliki legalitas dan makin dekat dengan konstituennya. Selama ini dirasa bahwa para anggota legislatif telah 'terpisah' dari para pemilih karena berdasarkan sistem nomor urut tersebut. Situasi itu kemudian membawa partai politik memiliki peranan yang besar dalam menentukan anggota legislatif yang akan ditempatkan di kursi dewan tersebut. Sedangkan bagi yang kontra, keputusan MK tersebut merupakan liberalisasi politik yang akan berakibat pada meningkatnya politik orang kaya karena dengan sistem suara terbanyak tersebut hanya calon yang memiliki kemampuan material yang berlebih yang akan dapat bertahan.

Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat partisipasi dan minat perempuan untuk mengikuti pencalonan pada pemilu 2014 cukup tinggi, dimana jumlah perempuan yang terdaftar berjumlah 144 orang, dan hanya 4 orang yang berhasil menduduki kursi parlemen, hal tersebut

dapat dilihat pada Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Indragiri Hilir pada Pemilu 2014.

Dengan demikian, yang menjadi masalah dalam hal ini yaitu dengan adanya keputusan MK tentang sistem suara terbanyak tersebut seolah-olah mementahkan perjuangan kaum perempuan dalam berpolitik, karena hal itu berarti menandakan hilangnya porsi perempuan dalam anggota dewan yang tadinya sudah aman dengan adanya jumlah kuota tertentu sebagai syarat untuk dapat duduk di lembaga legislatif. Seharusnya perjuangan kaum perempuan dalam bidang politik mendapatkan bantuan dalam mengupayakan serta meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yang dikarenakan masih besarnya dominasi kaum pria di lembaga tersebut dan seolah-olah keputusan MK ini tidak membantu perjuangan mereka. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah karya ilmiah dengan judul **“Perjuangan Politik Perempuan Meraih Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir Pada Periode 2014-2019”** dengan alasan bahwa penelitian ini ingin mengungkap bagaimana perjuangan politik perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir pada pemilu yang telah digelar dalam meraih kursi DPRD periode 2014-2019.

Rumusan masalah

- a. Bagaimana wujud perjuangan politik perempuan dalam meraih kursi legislatif pada pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2014-2019?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat perjuangan politik perempuan di Kabupaten Inhil dalam meraih kursi DPRD pada pemilu 2014-2019 ?

Tujuan penelitian

- a. Mengetahui bentuk-bentuk perjuangan politik yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014-2019 di Kabupaten Inhil?
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perjuangan politik kaum perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014-2019 di Kabupaten Inhil?

Kegunaan penelitian

- a. Sebagai kontribusi ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis serta berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang memerlukan untuk bahan perbandingan penelitian yang sama selanjutnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan pada program studi ilmu pemerintahan di fisipol Universitas Riau.

KERANGKA TEORI

Definisi partai politik

Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar dan dapat

menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik yang lebih luas. (Miriam Budiarjdo, 2005: 162)

Fungsi partai politik

- a. Sebagai sarana sosialisasi politik, merupakan proses pengenalan nilai-nilai politik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam proses ini antara lain dikenalkan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan serta cara-cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik.
- b. Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik menyalurkan beraneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat dapat berkurang.
- c. Sebagai sarana rekrutmen politik, merupakan fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat dan aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian partai tersebut telah memperluas partisipasi politik.
- d. Sebagai sarana pengatur konflik, dalam suasana demokrasi persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar, jika terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya. (Miriam Budiarjdo, 2005: 164)

Faktor pendukung kemenangan.

1. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam partai politik itu sendiri.
2. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar tubuh partai politik tersebut.

Faktor internal ini bisa berupa konsolidasi partai, rekrutmen, dan kaderisasi anggota partai politik. Sedangkan yang termasuk dalam faktor eksternal yaitu pelaksanaan pemilu itu sendiri, dan persepsi masyarakat terhadap partai politik yang bersangkutan dan sistem politik yang berlangsung. (Syamsudin Haris, 1991: 133)

Jenis-jenis Kampanye

1. Kampanye tatap muka yakni kampanye yang dilakukan dengan cara memberikan peluang kepada calon legislatif untuk melakukan komunikasi tatap muka didepan pemilih.
2. Kampanye interpersonal yaitu kampanye yang dilakukan melalui media massa, hal ini bisa dilakukan dengan cara tatap muka maupun menggunakan perantara.
3. Kampanye organisasi adalah kampanye yang didalamnya juga turut serta pejabat tinggi. Dalam kampanye ini terkesan bahwa organisasi ini mendapat dukungan yang luas melebihi barisan partisipan untuk menyokong dan bekerja demi kepentingan kandidat mereka. (Dan Nimmo 2004: 207)

Definisi Operasional

1. Strategi, yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh caleg perempuan melalui perencanaan sistematis dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2014 kabupaten Indragiri Hilir
2. *Political marketing* adalah upaya pemasaran sebuah produk politik, yaitu pemasaran seorang calon legislatif kepada masyarakat yang bersaing pada pemilihan umum legislatif 2014 di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan tujuan agar

calon legislatif tersebut pantas dipilih oleh masyarakat.

3. *Positioning* adalah strategi komunikasi yang mencerminkan keunggulan calon terhadap kontestan pesaing dalam bentuk hubungan asosiatif.
4. *Policy* adalah tawaran program kerja jika terpilih kelak.
5. *Person* adalah kandidat yang akan dipilih melalui pemilu.
6. *Party*, sebagai substansi produk politik. Partai mempunyai identitas utama, aset reputasi dan identitas estetis.
7. *Presentation* adalah bagaimana ketiga substansi produk politik (*policy, person, party*) disajikan. Presentasi sangat penting karena dapat mempengaruhi makna politik yang terbentuk dalam pikiran para pemilih.
8. *Push marketing* adalah penyampaian produk politik langsung kepada para pemilih.
9. *Pull marketing* adalah penyampaian produk politik dengan memanfaatkan media massa.
10. *Pass marketing* adalah penyampaian produk politik kepada *influencer groups* (kelompok berpengaruh).
11. *Polling* adalah pemandu proses *political marketing* agar berjalan terkendali sesuai sasaran objektif.
12. Partai politik (parpol) adalah sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
13. Calon legislatif (Caleg) adalah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat,

dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai politik untuk menjadi anggota legislatif dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai calon legislatif tetap.

14. Pemilu legislatif adalah proses pemungutan suara untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir periode 2014-2019.
15. Kampanye adalah suatu usaha sosialisasi calon legislatif kepada masyarakat pemilih guna mempengaruhi keputusan masyarakat pemilih dalam memilih anggota legislatif.
16. Tindakan afirmatif adalah langkah-langkah khusus sementara yang dilakukan untuk mmencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang bermaksud mencari fakta sebanyak-sebanyaknya untuk kemudian diambil suatu kesimpulan (Winarno Surakhmad, 1989: 143).

Jenis Data

- a. Data premier
Data premier adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang mendalam dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan tentang strategi dan faktor-faktor pendukung kemenangan caleg perempuan pada

pemilihan umum legislatif 2014 di Kabupaten Indragiri Hilir.

- b. Data sekunder
Data yang diperoleh berupa data yang sudah diolah dan diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang yang berupa data hasil pemilu legislatif Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2014 dan data susunan kepengurusan partai bulan dan bintang Kabupaten Indragiri Hilir. Data juga berasal dari buku, media massa, jurnal, seputar masalah penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

Teknik Analisa Data

- a. Reduksi data
- b. Penyajian data
- c. Penarikan kesimpulan

Lokasi dan Informan Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir, dan informan pada penelitian ini adalah, empat caleg perempuan terpilih dan empat caleg perempuan yang tidak terpilih pada pemilu periode 2014-2019 di kabupaten Inhil.

HASIL PENELITIAN

Pembahasan

Aksesibilitas Politisi Perempuan di Kabupaten Inhil

Partai politik (parpol) merupakan perantara yang besar dan dapat menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan

mengaitkannya dengan aksi politik yang lebih luas (Miriam Budiardjo, 2005: 162).

Menurut Budiardjo (dikutip oleh Koirudin 1994), bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup pemberian suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, dan menjadi anggota suatu partai atau *interest group*.

Setidaknya ada tiga jenis partisipasi yang parpol terlibat di dalamnya, yaitu kegiatan pemilihan, *lobbying*, dan kegiatan organisasi. Di tiga jenis partisipasi ini kedudukan parpol benar-benar diperhitungkan dan sangat berpengaruh. Hal ini dapat dimaklumi karena memang peraturan perundang-undangan dan keadaanlah yang memaksa parpol untuk terlibat langsung.

Hasil penelitian diketahui dari hasil wawancara dengan delapan informan di Kabupaten Inhil, menunjukkan bahwa beberapa partai telah melaksanakan fungsi kaderisasi terhadap kader-kader perempuan melalui proses rekrutmen. Informan yang berasal dari kalangan keluarga pejabat, dan yang memiliki intensitas ekonomi politik yang besar cenderung mendapatkan akses yang lebih mudah untuk meraih kursi di DPRD.

Hambatan Perjuangan Politik Perempuan Meraih Kursi DPRD

Hambatan Politik

Hadirnya beberapa hambatan mendasar yang menjadi indikator sebagai faktor penghalang bagi perempuan untuk tampil di barisan terdepan dalam aspek pembangunan dan politik. Banyak data dan fakta yang menunjukkan bahwa adanya

kesenjangan dan diskriminasi gender dalam lembaga negara, baik lembaga politik maupun birokrasi. Undang-undang Pemilu tahun 2004 menetapkan kuota 30% kursi di legislatif untuk kaum perempuan. Keputusan penting dalam dunia politik Indonesia ini jelas merupakan salah satu hasil perjuangan kesetaraan gender. Namun keputusan ini menuai banyak kontroversi justru dari kalangan perempuan sendiri yang menolak dengan alasan membatasi langkah perempuan. Apabila ditinjau dengan hitungan statistik berdasarkan jumlah masih dinilai tidak adil. Sepintas apabila dicermati, permintaan kuota 30% untuk perempuan di parlemen memang bernuansa pembatasan peran, namun menilik sejarah dan realitas peran perempuan yang hanya 12% pada pemilu 1997 di parlemen menunjukkan pola pikir dan gerakan yang progresif.

Hambatan Kelembagaan dan Struktural

Partai-partai politik berperan penting dalam mempengaruhi jumlah perempuan yang terpilih masuk ke parlemen. Saat ini, dalam organisasi-organisasi mereka sendiri, partai-partai politik belum menunjukkan komitmen yang kuat dan rumusan-rumusan kebijakan mengenai kesempatan yang setara bagi anggota perempuan agar terpilih sebagai “fungsionaris” partai dan anggota parlemen. Cara partai-partai politik menyusun daftar-daftar itu, dan apakah perempuan ditempatkan pada posisi-posisi yang dapat “dipilih” sejauh ini mengindikasikan kurangnya perhatian dan komitmen bagi representasi perempuan. Dalam beberapa hal, tindakan-tindakan diskriminatif dilakukan oleh fungsionaris partai politik terhadap anggota perempuan mereka sendiri dalam menyeleksi para calon mereka untuk parlemen daerah dan nasional.

Hambatan Pendidikan Politik

Institusi politik yang dimaksud adalah partai politik dimana partai politik menjadi instrumen yang paling penting

dalam sistem demokrasi serta peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia politik baik pada masa pemilu ataupun dalam kelembagaan partai, seperti yang didefinisikan oleh Sartori dalam buku *Dasar-dasar Ilmu Politik* karangan Prof. Miriam Budiardjo pada hal. 404-405 bahwa : “partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik”.

Melalui partai politik, seharusnya kaum perempuan dapat menyalurkan partisipasi politiknya untuk dipilih dan memilih. Dalam pemenuhan kuota 30%, perempuan cenderung tidak ditempatkan pada posisi-posisi yang strategis untuk hal pengambilan kebijakan ataupun proses nomor urut pada masa pemilihan. Jelas hal ini dapat menjadi salah satu penghambat kaum perempuan dalam berpolitik apabila di partainya sendiri kaum perempuan di “anak tirikan” atau adanya perempuan dalam partai sama seperti tidak adanya mereka. Terbukti dari banyaknya partisipasi politik kaum perempuan pada pemilu tahun 2014 yang lalu hanya segelintir perempuan saja yang mampu menduduki kursi legislatif di Kabupaten Inhil.

Hambatan Ekonomi

Paradigma yang berkembang dewasa ini mengenai perjuangan meraih kursi legislatif itu membutuhkan biaya ekstra mahal benar adanya. Kampanye ke daerah-daerah pemilihan serta biaya-biaya administrasi yang harus dikeluarkan untuk tercapainya tujuan yang diinginkan tidaklah murah. Dan jumlahnya bisa dibilang sangat fantastis. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab ciutnya nyali kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik.

Hambatan Pribadi dan Psikologis

Nuansa politik yang cenderung brutal dan kotor bisa jadi salah satu indikator akan rendahnya partisipasi politik dari kaum perempuan, mengingat kodratnya perempuan adalah sosok makhluk yang mempunyai sisi kelembutan dan penyayang.

Wajah politik kontemporer yang dikenal keras dan kejam dianggap tidak relevan dengan karakteristik yang dimiliki oleh kaum perempuan, membuat kaum perempuan ragu untuk terjun secara totalitas di dunia perpolitikan, belum lagi peran ganda yang harus dihadapi oleh kaum perempuan, mengurus keluarga dan merawat anak serta urusan dapur yang jelas peran kaum perempuan tidak dapat tergantikan oleh kaum laki-laki

Modalitas Dalam Kontestasi Politik Modal Politik

Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan transparansi tentang modal politik ini jauh lebih sedikit dibanding transparansi mengenai modal simbolik (*symbolic capital*), modal sosial (*social capital*), maupun modal ekonomi (*economic capital*). Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu (1930-2002), adalah sosok pelopor dalam mengkaji berbagai bentuk modal itu (*multiple forms of capital*).

Sementara itu modal simbolik atau dalam hubungannya dengan dinamika politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan (*respect*) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun lembaga-lembaga politik akibat tindakan-tindakan politik yang dilakukan atau tidak dilakukannya.

Modal Sosial

Latar belakang sosial yang dimiliki caleg bisa diartikan seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat,

organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan Modal sosial yang harus dimiliki oleh orang-orang yang membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan.

Kepercayaan di gunakan untuk memperoleh kedudukan seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya atas dasar kepercayaan masyarakat. Jika kekuasaan dilanggar, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada pemegang kekuasaan. Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan pemenangan pemilu, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat orang-orang harus memiliki pengaruh tersebut.

Pandangan para pakar dalam mendefinisikan modal sosial di bagi dalam dua kelompok. Pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial (*social network*), sedangkan kelompok kedua lebih kepada karakteristik yang melekat (*embedded*) pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial.

Sejumlah ahli menyampaikan pandangan berbeda tentang modal sosial tetapi memiliki korelasi seperti diolah Mefi Hermawati yang dapat dicermati sebagai berikut :

- a. Robert Putnam (1993) : modal sosial adalah suatu *mutual trust* antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Pendapat ini mengandung pengertian diperlukan ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong

produktivitas. Putnam juga melonggarkan makna asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi *desireable outcome* (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga *undesirable outcome* (hasil tambahan).

- b. Pierre Bourdieu (1970), mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain : keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif”. Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk *social capital* (modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu).
- c. James Coleman (1999) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, bentuk-bentuk modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial. Coleman

membagi dua kubu, yaitu sosiologis dan ekonom yang masing-masing berbeda ketika melihat modal sosial sebagai entitas dalam ruang partisipasi publik.

- d. Dari sudut pandang lain, North (1990) dan Olson (1982) menekankan Lingkungan sosial politik sebagai modal sosial. Faktor lingkungan berpengaruh pada peluang bagi norma untuk mengembangkan dan membentuk struktur sosial. Jika pandangan Putnam dan Coleman hanya menekankan pada asosiasi horisontal dan vertikal, North dan Olson menambahkan peran struktur dan hubungan institusional yang lebih formal, seperti pemerintah, rezim politik, hukum, sistem peradilan, serta kebebasan sipil dan politik.

Analoginya adalah ketika seorang calon anggota legislatif terpilih tidak berdasarkan modal sosial berupa kepercayaan yang tinggi, akan kesulitan menjalankan misi politik sehari-harinya.

Modal Ekonomi

Pengertian modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda yang memiliki nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang/mata uang. Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa barang atau uang/jasa politik. Dalam pemilu modal ekonomi merupakan hal utama yang harus dimiliki setiap caleg yang ingin terjun berkompetisi.

Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Didalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan

yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya.

Para ekonom telah lama berbicara mengenai modal (*capital*) ini, khususnya modal ekonomi atau finansial (*financial capital*). Modal finansial adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat-alat produksi perusahaan (misalnya pabrik, mesin, alat kantor, kendaraan) atau sejumlah uang yang dapat dikumpul atau ditabung untuk investasi di masa depan. Konsep modal seperti ini relatif mudah dipahami oleh orang awam sekalipun, karena membelanjakan atau menginvestasikan uang merupakan bagian kehidupan

sehari-hari manusia dan melibatkan pemikiran yang jelas. Modal finansial juga mudah untuk diukur. Uang dapat dihitung, karena jumlah uang yang dibelanjakan dapat diidentifikasi dengan barang yang dibeli.

Ahli ekonomi John Stuart Mill dalam *Principle of Political Economy* (1848) seperti dikutip Augusto Bunga (2008), menggunakan istilah “*capital*” dengan arti : (1) barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dan (2) suatu dana yang tersedia untuk mengupah buruh. Pada akhir abad ke-19, modalitas dalam artian barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dipandang sebagai salah satu di antara empat faktor utama produksi (tiga lainnya adalah tanah, tenaga kerja dan organisasi atau manajemen). Para ahli ekonomi neo-klasik menggunakan pandangan ini (misalnya Alfred Marshall dalam *Principles of Political Economies* 1890). Modal dalam konteks ekonomi seringkali dipadankan dengan pemikiran tentang kapitalisme dengan segala kontroversinya. Modal politik dan ekonomi saling berkaitan dalam iklim politik yang menekankan kepada interaksi spontan (jarak waktu komunikasi yang

pendek) antara pemilih dan calon politik. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku calon politisi mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalur pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang masih dalam proses transisi menuju Pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional.

Caleg memerlukan dukungan ekonomi selain dari kandidat juga berasal dari aktor-aktor ekonomi untuk kemenangan pilkada dalam pembiayaan semua kegiatan politik kandidat. Menurut Sahdan dan Haboddin bahwa Proses politik pilkada membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal. Hal ini menyebabkan tantangan bagi proses perkembangan demokrasi lokal, karena kandidat yang bertarung adalah para pemilik uang/modal yang besar. Mahalnya ongkos pilkada dapat disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu :

1. Para caleg yang akan bertarung diharuskan membeli partai politik sebagai kendaraan politik. Partai politik yang akan dijadikan kendaraan dalam pilkada mengharuskan pasangan calon untuk menyetor danaa sumbangan hingga miliaran rupiah.
2. Model kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon membutuhkan banyak biaya. Misalnya, buat poster, pemasangan iklan di media massa baik cetak maupun elektronika.
3. Untuk membujuk pemilih biasanya menggunakan praktek politik uang. Model pemberian uang kepada pemilih biasanya dilakukan hampir pada setiap proses pentahapan pilkada. Peredaran uang yang paling menonjol pada saat kampanye pasangan kandidat dan menjelang pemungutan suara.

Strategi yang digunakan Caleg Perempuan untuk Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Inhil

Strategi secara etimologis, ia berasal dari kata majemuk bahasa Yunani (siratos) yang artinya pasukan dan (agein) yang artinya memimpin, jadi strategi dalam bahasa Yunani artinya adalah memimpin pasukan “ali meortopo” strategi kebudayaan” 1978. Didalam kamus besar bahasa Indonesia “strategi” adalah rencana cermat untuk mencapai sasaran khusus, KBHI tahun 2001 hal 192, namun dalam kamus sosiologi kata strategi yaitu prosedur yang memunculkan alternatif pada beberapa tahap atau langkah ”Soerjono Soekanto” beberapa teori sosiologi tentang masyarakat” 1983 hal 349.

Strategi Caleg Perempuan untuk Meraih Dukungan Dan Simpati Melalui Pendekatan Organisasi Perempuan

Organisasi perempuan memberikan ruang tersendiri bagi caleg perempuan yang berperan aktif di dalamnya, selain menjadi wadah untuk pencitraan diri, organisasi juga memberikan keuntungan-keuntungan lainya bagi caleg perempuan itu sendiri, seperti:

- a. Jaringan yang luas
Telah menjadi anggota Lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi-organisasi masyarakat(ormas) membuatnya telah dikenali oleh pemilihnya jauh hari sebelum masa pemilu.
- b. Memiliki ilmu
Organisasi adalah miniatur sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan. Dengan berbekalakan ilmu yang telah dimiliki selama aktif dalam kepengurusan organisasi dapat memudahkan caleg perempuan untuk kemudian menjalankan kepengurusan dalam pemerintahan yang menyangkut hajat masyarakat.

- c. Lebih berani dan percaya diri. Organisasi dapat merubah kepribadian seorang yang pemalu dan pendiam menjadi lebih berani dan aktif. Caleg perempuan yang sebelumnya telah aktif dalam sebuah organisasi akan berbeda dengan caleg perempuan yang sama sekali tidak pernah ikut dalam organisasi ketika tampil di depan publik.

Melalui Pendekatan Tokoh Masyarakat

Pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan mencoba untuk menurunkan kerentanan dalam upaya menangani permasalahan yang terjadi di lingkungan. Pendekatan dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara-cara yang relatif sederhana dan mudah dilaksanakan, maka masyarakat di kalangan bawahpun dapat melakukan perubahan yang positif untuk menuju ke arah yang lebih baik.

Tidak bisa dipungkiri bahwa rasionalitas pemilih pada masa sekarang ini sudah semakin meningkat. Masyarakat tentu tidak ingin jatuh ke lubang yang sama dalam hal ini tidak ingin tertipu dengan janji-janji kampanye dari para calon legislatif. Hal ini menyebabkan para caleg perempuan diharuskan untuk terjun ke masyarakat dan melihat langsung kebutuhan dari masyarakat di setiap daerah pemilihan. Pendekatan praktis dengan motif memberikan sumbangan kepada masyarakat secara terbuka, Hal ini nampaknya sudah menjadi tradisi yang dilakukan setiap calon legislatif, tidak hanya caleg perempuan namun juga caleg laki-laki. Dengan harapan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, sehingga membuat masyarakat untuk memilihnya dalam pemilu.

Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat

Hal ini mengharuskan para caleg perempuan untuk terjun secara langsung ke masyarakat dan melihat kebutuhan dari masyarakat di setiap daerah pemilihan. Pendekatan praktis yang dimaksud peneliti dalam bahasan ini sebenarnya adalah bentuk lain dari *money politic*. dengan motif memberikan sumbangan kepada masyarakat. Prilaku tersebut telah menjadi tradisi yang dilakukan oleh setiap calon legislatif dengan harapan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat.

Perempuan dan Politik di Kabupaten Inhil, (Sebuah Analisis Menggunakan Teori Oligarki Parpol Daniel Dhakidae

Keterwakilan konstituen atau pemilih hanya terwakili berdasarkan ikatan kedaerahan dan etnis, kelompok minoritas mendominasi kelompok mayoritas. Realitas politik itu seolah menguatkan analisis Daniel Dhakidae tentang Oligarki Partai Politik bahwa di setiap organisasi partai politik, pada hakikatnya hanya dikuasai segelintir elite. Dominasi dan nepotisme yang dilakukan oleh elite masih menjadi isu sentral politik di Kabupaten Inhil. Hal itu terlihat dari susunan anggota legislatif terpilih dimana elite parpol yang secara finansial mampu dan menguasai “jalan pintas” sajalah yang mampu duduk di kursi legislatif. Meskipun warga negara memiliki hak untuk memilih siapa yang menjadi wakilnya di pemerintahan, sifat representatif itu sendiri menyebabkan warga negara sebagai golongan terbesar menjadi terasing dengan sistem politik yang berlaku.

Kaum perempuan yang diharapkan dapat menjadi *agent of change* dalam era politik yang keras dan brutal ini hanya jadi isapan jempol belaka. Bagaimana tidak, pemenuhan kuota 30% bagi kaum perempuan dinilai hanya sebagai formalitas dalam melaksanakan amanah undang-

undang saja. Elit parpol yang mayoritasnya dikuasai oleh kaum pria tidak memberikan ruang yang luas kepada kaum perempuan untuk turut berperan aktif dalam kelembagaan, posisi pengambilan kebijakan dalam parpol umumnya diperuntukkan ahanya bagi kaum laki-laki saja.

Keikutsertaan perempuan sebagai calon legislatif di Kabupaten Inhil kelihatannya juga kurang mendapat tempat dalam budaya politik di Kabupaten Inhil. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Inhil. Kebijakan elit parpol dalam mengutamakan hak-hak politik yang setara bagi kaum perempuan, sepertinya masih jauh dari harapan. Betapa tidak, dukungan yang pada awalnya diberikan (dijanjikan) kepada caleg perempuan berujung pada pemanis belaka. Itu tercermin dari ketidakadilan yang diterima caleg perempuan selama proses kandidasinya menuju kursi legislatif.

Peneliti akhirnya menyimpulkan bahwa sungguh *powerfull* nya elite parpol dan politik dalam sistem politik di Kabupaten Inhil. fenomena oligarki politik ini setidaknya disebabkan empat hal. Pertama, imbas dari sistem pemilu dan persaingan yang kian liberal. Karena itu, nama besar dan ketokohan sejumlah keluarga petinggi parpol diyakini dapat menjadi modal meraup suara. Kedua, potret kegagalan parpol dalam mengikat konstituennya. Karena itu, elite parpol cenderung mencari siasat untuk menarik konstituennya dengan menempatkan caleg yang layak jual. Cara instan yang digunakan adalah melirik figur terkenal yang menguasai sumber-sumber ekonomi dan memiliki nama besar di masyarakat. Ketiga, lemahnya sistem kaderisasi dan pola rekrutmen di internal parpol, terutama mekanisme dalam penentuan caleg. Keempat, terlalu besarnya daya cengkeram kekuasaan para elite parpol.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan gambaran betapa jalan panjang merebut akses politik untuk kaum perempuan di Kabupaten Inhil sangatlah penuh dengan jerih payah dan pengorbanan. Tampaknya perjuangan politisi perempuan di Kabupaten Inhil untuk menjadi anggota legislatif masih sangat berat. Mengingat dominasi politisi laki-laki yang begitu kuat. Walaupun sebenarnya pemerintah telah memberikan peluang yang sama bagi kaum perempuan melalui UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, implementasinya di Kabupaten Inhil belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Keikutsertaan perempuan di dunia politik di Kabupaten Inhil masih didasari oleh beberapa hal berikut, yaitu Pertama karena latar belakang keluarga yang memang sudah secara turun temurun menguasai sumber-sumber politik yang ada, seperti contoh pada caleg perempuan yang berasal dari keluarga pejabat. Anggota keluarga perempuan yang berasal dari keluarga pejabat ini, telah bertransformasi sebagai elit perempuan yang juga berkiprah di dunia politik, selain pada tugasnya sebagai pemimpin pengajian untuk kaum perempuan.

Kedua, perempuan yang terjun di dunia politik di Kabupaten Inhil adalah memang berlatarbelakang sebagai seorang aktivis atau tokoh perempuan yang telah berkecimpung dalam organisasi perempuan di Kabupaten Inhil. Yang ketiga, perempuan yang terjun ke dunia politik di Kabupaten Inhil hanyalah sebagai pelengkap saja, sebagai formalitas persyaratan administratif kuota 30%.

Motivasi dan tujuan perempuan untuk terjun ke dunia politik juga beragam seperti yang telah disimpulkan peneliti dari wawancara dengan kedelapan informan, yaitu yang pertama adalah caleg perempuan

ingin mengangkat derajat dan kualitas hidup kaum perempuan dengan menyuarkan aspirasinya ke ranah legislatif melalui program pemberdayaan perempuan. Kedua karena motivasi pribadi yaitu untuk meningkatkan kondisi keuangan keluarga dan menaikkan prestis dan martabat keluarga. Ketiga, caleg perempuan ini hanya sekedar ikut-ikutan saja, untuk memenuhi kuota perempuan 30% tanpa memperhitungkan peluang jadi ataupun tidak.

Hambatan yang ditemui perempuan selama proses pencalonannya sebagai caleg da pada saat berkampanye di masyarakat adalah, pertama, dominasi elite parpol yang mayoritas adalah laki-laki dengan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak strategis pada kepengurusan, sehingga perempuan memiliki sedikit peran untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Kedua, penempatan caleg perempuan pada nomor urut buncit dan pada dapil yang bukan “wilayahnya” juga dapat merugikan caleg perempuan dari segi perolehan suara. Ketiga, fungsi parpol untuk memberikan pendidikan politik dan sosialisasi politik yang sesuai dengan ketentuan tidak dijalankan. Ini menyebabkan kualitas caleg perempuan menjadi rendah, dan pada akhirnya mempengaruhi pada elektabilitas dan popularitas yang juga rendah. Keempat, adanya kecurangan yang dilakukan oknum-oknum yang berambisi dengan menghalalkan segala cara untuk menjadi anggota legislatif terpilih seperti dengan politik uang untuk memuluskan jalannya ke kursi legislatif. Caleg perempuan yang sebagian besar tidak berasal dari kalangan yang memiliki modal besar, tentu akan menjadi ciut ketika harus berhadapan dengan caleg laki-laki yang menguasai sumber ekonomi yang berlimpah.

Strategi yang digunakan perempuan untuk menjadi anggota legislatif di Kabupaten Inhil adalah sebagai berikut,

pertama melalui pendekatan organisasi perempuan Kedua melalui pendekatan tokoh masyarakat. Hubungan patronase Ketiga, melalui pendekatan program pemberdayaan masyarakat. Rasionalitas pemilih yang semakin meningkat dewasa ini menyebabkan calon legislatif harus terjun langsung ke masyarakat dan menjangir aspirasi serta kebutuhan masyarakat khususnya di masing-masing dapil. Keempat, melalui pendekatan praktis dalam hal ini berbentuk sumbangan. Sumbangan adalah bentuk lain dari money politik. Alih-alih memberikan bantuan baik berupa modal atau barang, para calon legislatif sebenarnya melakukan hal tersebut tidak lain karena ingin mendapatkan simpati masyarakat sehingga pada saat hari H pemilihan legislatif, masyarakat tersebut akan memilih caleg yang bersangkutan. Berbagai realitas politik yang ditemui penulis selama penelitiannya di Kabupaten Inhil.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Kelola. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*
- Alwis. 1997. *Perilaku Politik*
- Budiarjdo, Miriam. 2005. *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Firmansyah. 2007. *Marketing Politik*
- Haris, Syamsudin. 1991. *PPP dan Orde Baru (Seri Pendidikan Politik)*, Jakarta : Grasindo
- Nursal, Adnan. 2004 *Strategi Memenangkan Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

- Pambudi, yusuf moh. *Perempuan dan politik studi tentang aksesibilitas perempuan menjadi anggota legislatif*
- Supriyono. 1998. *Pengantar Manajemen Strategi*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Tripomo, Tedjo. 2005. *Manajemen Strategi*, Bandung : Rekayasa Sains
- Valentina, Rika Tengku & Rusta, adri. *Affirmatif action untuk demokrasi yang berkeadilan gender pada pemilu 2009*
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Surbakti, Ramlan. 2003. *Memahami Ilmu Politik*, jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Dhakidae, Daniel. 2004 . *Partai-Partai Indonesia Ideologi Dan Program 2004-2009*,jakarta : Kompas
- Mulia, Siti Musdah. 2008. *Menuju kemandirian politik perempuan*, yogyakarta : kibar press
- Siagian, sondang P. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara
- Nimmo, Dan. 2004. *Komunikasi Politik Khalayak Dan Efek*, Pengantar Jalaluddin Rahmat, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Surakhmad, Winarno. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode Dan Teknik*, Bandung : Tarsito.
- Sutopo, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta : 11 maret university press.
- Budiarjdo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta : PT Gramedi Pustaka Utama.
- Ibrahim, Marwah Daud. 1996. *Perempuan Indonesia: Pemimpin Masa Kini Mengapa Tidak ?* Jakarta : PT media Indonesia,
- Putnam, Robert D. 1993. *The Prosperous Community social capital and public life*, spring : the America prospect
- Coleman, james. 2008. *Dasar-Dasar Teori Social*, Bandung : Nusa Media,
- Bunga Augusto, sekilas tentang pengertian modal, dalam <http://rumah> desain revolusi. Blogspot.com, unduh tanggal 28 maret 2015, pukul 21:34.
- [www. Rumah pemilu.org.com](http://www.Rumahpemilu.org.com) . unggah tanggal 05 februari 2015, pukul 13.15.
- [www. Komnas perempuan.or.id](http://www.Komnasperempuan.or.id). berita komnas perempuan, unggah tanggal 05 februari 2015, pukul 13:30.